

Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Wilayah Kabupaten Blitar

(Determination of the Center of Economic Growth and Spatial Interaction in Blitar Regency Area)

Irma Meliana Devi*, Duwi Yunitasari, Teguh Hadi Priyono, Agus Mahardiyanto, Rachmania Nurul Fitri Amijaya, Rafael Purtoomo Somaji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jember, Indonesia
Email: irmameliana14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi spasial guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar. Pusat pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu pusat pertumbuhan primer, pusat pertumbuhan sekunder, dan pusat pertumbuhan tersier beserta daerah hinterlandnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Skalogram dan Analisis Gravitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan dengan ketersediaan fasilitas paling tinggi terletak di Kecamatan Garum. Kecamatan yang memiliki daya tarik terbesar terletak di Kecamatan Kanigoro. Pusat pertumbuhan primer terletak di Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun dan Kecamatan Sutojayan. Pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Kademangan. Pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Wlingi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wates dan Kecamatan Panggungrejo. Dan daerah hinterland terletak di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Binangun, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung.

Kata kunci: Pusat Pertumbuhan, Interaksi Spasial, Analisis Skalogram, Model Gravitasi

Abstract

This study aims to determine the center of economic growth and spatial interaction to increase economic growth in Blitar Regency. Economic growth centers are divided into 3, namely primary growth centers, secondary growth centers, and tertiary growth centers along with their hinterland regions. This study used secondary data taken from the Central Statistics Agency (BPS) and other relevant agencies. The analytical tools used are Scalogram Analysis and Gravity Analysis. The results showed that the sub-district with the highest availability of facilities is located in Garum District. The sub-district that has the biggest attraction is located in Kanigoro District. Primary growth centers are located in Garum District, Kanigoro District, Talun District and Sutojayan District. Secondary growth centers are located in Nglegok District, Ponggok District, Selopuro District and Kademangan District. Tertiary growth centers are located in Wlingi District, Srengat District, Sanankulon District, Kesamben District, Wates District and Panggungrejo District. And the hinterland area is located in Gandusari District, Doko District, Wonodadi District, Udanawu District, Binangun District, Selorejo District, Wonotirto District and Bakung District.

Keywords: Center of Growth, Spatial Interaction, Scalogram Analysis, Gravity Model

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha perubahan yang dilakukan secara sadar oleh seluruh bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994). Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan proses pembangunan yang berusaha menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan

karena adanya kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah pada umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga berbeda-beda (Todaro, 2009).

Pembangunan wilayah meliputi berbagai bidang, yaitu diantaranya pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Penerapan konsep wilayah pembangunan merupakan media untuk merumuskan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah (Gultom & Hendaro, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015), dimana salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempercepat pembangunan suatu daerah adalah pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat

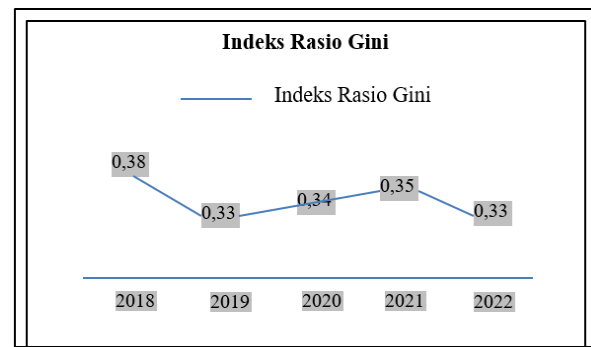
* Corresponding Author

pertumbuhan, maka pemerintah dapat lebih fokus untuk membangun daerah pusat pertumbuhan sehingga akan memberikan efek yang menguntungkan kepada daerah hinterlandnya.

Hipotesis Neo-klasik menjelaskan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat (Sjafrizal, 2012). Proses tersebut akan terjadi sampai ketimpangan mencapai titik puncak, namun setelah itu apabila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah akan menurun (Silviana, 2021). Hampir semua negara berkembang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sama yaitu kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, angka kriminalitas yang tinggi sampai dengan munculnya kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah disebabkan oleh keanekaragaman potensi yang dimiliki antar wilayah, sehingga hasil pertumbuhan antara wilayah satu dengan wilayah lain akan berbeda. Adanya corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda di setiap wilayah, maka diperlukan perencanaan strategis terkait pembangunan ekonomi bagi masing-masing wilayah (Rustiadi et al., 2011).

Menurut analisis tipologi klasen yang dilakukan oleh (Darmawan & Tukiman, 2020) Kabupaten Blitar termasuk dalam kuadran IV yaitu “Daerah Relatif Tertinggal” yakni daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Perkembangan PDRB Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2022 dibandingkan dengan rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur masih relatif rendah. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar mengalami kondisi yang cenderung fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kemantapan perekonomian yang ada di wilayah tersebut, sehingga menandakan masih terdapat permasalahan perekonomian.

Permasalahan tentang kemiskinan di Kabupaten Blitar umumnya masih tergolong tinggi, jika dipresentasikan sebesar 10% dari total seluruh penduduk Kabupaten Blitar. Dalam permasalahan kemiskinan ini, Kabupaten Blitar selama 2 tahun berturut-turut (2021-2022) berada pada peringkat 26 kemiskinan dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Indeks rasio gini Kabupaten Blitar selama Tahun 2018 - 2022 cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kesenjangan pendapatan di masyarakat semakin melebar. Indeks rasio gini menunjukkan capaian yang belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Blitar hampir menyentuh angka 0,4 atau >0,4 dimana angka tersebut merupakan indikator tingkat ketimpangan yang relatif tinggi. Sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Indeks Rasio Gini Kabupaten Blitar
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar mengalami kesenjangan pembangunan, dimana hanya berfokus di wilayah Blitar Utara dibandingkan Blitar Selatan (Rahman et al., 2020). Penyebab kesenjangan pembangunan tersebut adalah faktor topografi, geografis maupun keadaan sosial masyarakat. Selain itu, infrastruktur berupa akses jalan di bagian Blitar Utara dan Blitar Selatan yang menunjukkan kesenjangan pembangunan, yakni akses jalan yang ada di Blitar bagian selatan merupakan tanah dengan tipe tanah gerak, tidak stabil dengan topografi berupa pegunungan yang berkelok-kelok. Salah satu hambatan pembangunan di Kabupaten Blitar adalah perpindahannya ibukota/pusat pemerintahan yang semula masih berdiri dan ikut di Kota Blitar sekarang berpindah di Kecamatan Kanigoro.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan berbagai rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi yang berfokus kepada sarana pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan ketersediaan fasilitas sekolah di Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan, mengingat rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah meningkat cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Blitar masih minim (pada tahun 2020 rasio rumah sakit persatuan penduduk yakni 1:1.509) sehingga pelayanan kesehatan perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana layanan publik juga perlu ditingkatkan (RPJMD 2021). Temuan permasalahan terkait dengan minimnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas layanan publik, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI – SMP/MTs, Persentase Kondisi Bangunan Baik SD/MI – SMP/MTs dan Rasio Rumah Sakit (TT) Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah		Persentase Kondisi Bangunan Baik		Rasio Rumah Sakit (TT) Per Satuan Penduduk Tahun
	SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs	
2016	4:00	5:34	89%	93%	1:1.564
2017	4:01	5:35	91%	95%	1:1.965
2018	4:01	5:35	91%	94%	1:1.900
2019	3:33	6:28	95%	98%	1:1.725
2020	3:33	6:28	95%	98%	1:1.509

Sumber: Publikasi RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026

Oleh karena itu, salah satu solusi dalam mengatasi kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Pemerataan Ekonomi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten tersebut serta pertumbuhan ekonomi akan perlahan meningkat. Dalam peningkatan pembangunannya, dapat berupa perlengkapan fasilitas dan perbaikan infrastruktur. Dengan menentukan pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan spillover effect positif pada daerah hinterland dari daerah pusat pertumbuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kecamatan mana yang memiliki ketersediaan fasilitas paling tinggi di Kabupaten Blitar. (2) untuk mengetahui kecamatan mana yang memiliki daya tarik terbesar di Kabupaten Blitar. (3) Untuk mengetahui kecamatan mana yang termasuk dalam pusat pertumbuhan primer, pusat pertumbuhan sekunder, pusat pertumbuhan tersier dan daerah hinterland di Kabupaten Blitar.

Kajian Teori

Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Neo-Klasik

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah persediaan barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Empat faktor tersebut merupakan faktor dasar pertumbuhan ekonomi wilayah neoklasik maupun kaum ekonomi lainnya (Sukirno, 1998). Tokoh ekonomi kaum neo-klasik yaitu G.H. Bort menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah disebabkan oleh kemampuan suatu wilayah itu sendiri untuk meningkatkan produktivitasnya, dimana kegiatan produksi tidak hanya didukung oleh potensi suatu wilayah saja melainkan didukung oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas antar daerah (Sjafrizal, 2008). Sehingga dengan meningkatnya produktivitas, maka kegiatan produksi juga akan meningkat.

Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah dengan berusaha menemukan berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat dengan memperbaiki kualitas hidupnya. Ada beberapa landasan teori dibalik penerapan pengembangan wilayah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk suatu ruang wilayah meliputi faktor fisik, sosial ekonomi serta budaya.
2. Hirschman sebagai pencetus teori polarization effect dan tricking down effect yang menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced development) atau pembangunan tidak seimbang.

3. Myrdal yang diidentikan dengan istilah backwash effect dan spread effect yang menjelaskan tentang hubungan antara wilayah, yaitu antara wilayah maju dan wilayah terbelakang.
4. Friedman dengan teori pusat pertumbuhan, yang menyatakan bahwa perlu penekanan terhadap pembentukan hierarki yang bertujuan untuk mempermudah pengembangan sistem pembangunan. Yang kemudian dikenal dengan istilah teori pusat.
5. Douglass sebagai pencetus model keterkaitan desa-kota (rural-urban linkages) dalam pengembangan wilayah.

Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori Pusat Pinggiran – John Friedman (1966)

Dalam teori pusat pinggiran, pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, dimana kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Menurut Friedman, pada skala regional dikenal dengan tiga orde, yaitu:

1. Pusat pertumbuhan primer adalah pusat utama dari keseluruhan daerah, yang dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang tingkatnya lebih rendah. Pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan jenis fasilitas dan potensi ekseibilitas terbaik serta mempunyai daerah belakang terluas yang lebih multifungsi dibandingkan dengan pusat lainnya.
2. Pusat pertumbuhan sekunder adalah sub daerah, pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan primernya. Penyebaran perkembangan yang tidak dijangkau oleh pusat pertumbuhan primer dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.
3. Pusat pertumbuhan tersier adalah pusat pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Pusat tersier ini berguna untuk menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

Sedangkan menurut Tarigan, pusat pertumbuhan dapat diartikan melalui dua cara yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan geografis. Secara pendekatan fungsional, pusat pertumbuhan merupakan sekelompok usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang terkonsentrasi pada suatu daerah dan memiliki hubungan yang dinamis dan saling mendorong sehingga berpengaruh terhadap perekonomian daerah itu maupun daerah belakangnya. Sedangkan secara pendekatan geografis, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memiliki kelengkapan fasilitas sehingga menjadi pusat daya tarik berbagai macam-macam usaha. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, terdapat multiplier effect (unsur pengganda), terdapat konsentrasi geografis dan bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah belakangnya (Tarigan, 2005).

Teori Interaksi Spasial

Pendapat yang dikemukakan oleh Reilly (1929) yang menyatakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti lapangan pekerjaan, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain-lain pada kedua wilayah tersebut. Namun karena adanya kemudahan data, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan kedua faktor penting yaitu jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Selanjutnya, model gravitasi yang dikembangkan oleh Ravenstein (1885), bahwa volume migrasi bergantung pada jarak. Migrasi cenderung menempuh jarak dekat, sedangkan untuk migrasi jarak jauh cenderung menuju pusat-pusat ekonomi penting. Ravenstein juga menyatakan bahwa keberadaan transportasi, kawasan industri dan perdagangan menyebabkan jumlah frekuensi migrasi meningkat dan pengambilan keputusan migrasi didorong oleh motif ekonomi. Perhitungan migrasi penduduk menggunakan model gravitasi digunakan untuk menghitung penyerapan migran di daerah tujuan yang dikaitkan dengan faktor jarak antara daerah pengirim dan penerima migran. (Optari, 2021).

Metode

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, disajikan dalam angka-angka yang merupakan aspek dari penelitian kuantitatif dan dijelaskan melalui metode deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian (Sugiyono, 2013).

Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian ini dilakukan di daerah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 kecamatan akan dijadikan subjek dari penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti BPS Kabupaten Blitar dan instansi terkait. Data tersebut mencakup fasilitas layanan publik meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas ekonomi, fasilitas komunikasi dan fasilitas pendukung lainnya serta jarak antar kecamatan.

- Fasilitas pendidikan, berjumlah 11 yakni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Perguruan Tinggi dan Pesantren.
- Fasilitas kesehatan, berjumlah 6 yakni Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek.
- Fasilitas peribadatan, berjumlah 6 yakni Masjid, Mushola, Gereja Protestan, Gereja Katholik, Pura dan Vihara.
- Fasilitas ekonomi, berjumlah 3 yakni Koperasi, Pasar dan Industri Kecil dan Makro.

- Fasilitas komunikasi, berjumlah 1 yakni Kantor Pos.
- Fasilitas pendukung lainnya, berjumlah 5 yakni Pariwisata, Hotel, Restoran, Terminal dan Stasiun.

Metode Analisis

Analisis Skalogram

Analisis skalogram adalah alat analisis untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketersediaan fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah (Rondinelli, 1985). Alat analisis ini digunakan untuk melihat jumlah dan jenis fasilitas yang berada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Blitar.

Dalam menentukan pusat pertumbuhan melalui analisis skalogram harus mencari range atau jangkauan adalah sebagai berikut (Gaffara et al., 2015):

$$R = T_B - T_K$$

Information:

R : Range atau jangkauan

T_B : jumlah fasilitas terbesar

T_K : jumlah fasilitas terkecil

Untuk menentukan orde menggunakan rumus:

$$O = 1 + 3,3 \log n$$

Information:

n : banyaknya kecamatan

O : Orde

Untuk menentukan interval kelasnya menggunakan rumus:

$$I = \frac{R}{O}$$

Information:

I : Interval

R : Range atau jangkauan

O : Orde

Kecamatan yang termasuk dalam kelas/orde I merupakan daerah yang memiliki tingkat fasilitas paling tinggi, sedangkan kelas/orde yang terakhir adalah daerah dengan tingkat fasilitas paling rendah. adapun kelas/orde ini diurutkan sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas dari daerah yang mempunyai fasilitas paling lengkap sampai dengan daerah yang mempunyai jumlah fasilitas paling sedikit sesuai dengan interval masing-masing.

Analisis Model Gravitasi

Model gravitasi digunakan untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya interaksi antar daerah. Dalam perencanaan suatu wilayah model ini sering digunakan untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada di wilayah yang tepat. Adapun rumus gravitasi yang digunakan dalam penelitian ini (Tarigan, 2004):

$$I_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{(d_{ij})^b}$$

Information:

I_{ij} : besarnya interaksi antara wil. A dan B

P_i : jumlah penduduk kecamatan i

P_j : jumlah penduduk kecamatan j

d_{ij} : jarak antara daerah I dan j

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil Analisis Skalogram

Berdasarkan Tabel 2, dari 32 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada di dalam satu kecamatan adalah sebanyak 28 jenis fasilitas, sementara yang terendah sebanyak 20 jenis fasilitas. Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah fasilitas tertinggi dan fasilitas terendah, maka kecamatan yang berada di Kabupaten Blitar dibagi ke dalam 5 kelas/orde, yakni:

- Kelas I: kelompok kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang paling tinggi yakni kecamatan yang memiliki 27 – 28 jenis fasilitas. Kecamatan yang berada di kelompok ini yaitu Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Wlingi.
- Kelas II: kelompok kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas yang tinggi yaitu sebanyak 25 – 26 jenis fasilitas, yakni Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Srengat.
- Kelas III: kelompok kecamatan dengan ketersediaan fasilitas yang sedang yakni memiliki 23 – 24 jenis fasilitas yaitu antara lain Kecamatan Kademangan, Kecamatan Talun, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Wonodadi.
- Kelas IV: kelompok kecamatan dengan jumlah fasilitas sebanyak 21 – 22 jenis yaitu antara lain Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Udanawu.
- Kelas V: kelompok kecamatan yang memiliki tingkat ketersediaan jenis fasilitas yang paling rendah, yakni sebanyak 20 jenis fasilitas. Kecamatan yang berada di kelompok ini adalah Kecamatan Bakung.

Tabel 2. Hasil Analisis Skalogram Kabupaten Blitar

Kecamatan	Jumlah Fasilitas	Kelas/Orde
Garum	28	I
Kanigoro	27	I
Kesamben	27	I
Wlingi	27	I
Sanankulon	26	II
Sutojayan	25	II
Nglegok	25	II
Ponggok	25	II
Srengat	25	II
Kademangan	24	III
Talun	24	III
Selorejo	24	III
Doko	24	III
Wonotirto	23	III
Selopuro	23	III
Wonodadi	23	III
Wates	22	IV
Binangun	22	IV

Panggungrejo	21	IV
Gandusari	21	IV
Udanawu	21	IV
Bakung	20	V

Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan kelompok kelas/orde tersebut, maka terdapat kecamatan yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan, yakni kecamatan yang berada pada kelas/orde/hierarki I – II. Hal ini didasarkan pada ketersediaan fasilitas pada kecamatan tersebut memiliki keberagaman lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Adapun kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas lengkap akan dapat berfungsi secara optimal dan dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila daya tariknya terhadap kecamatan lain juga tinggi. Sehingga hal ini perlu dilakukan analisis lanjutan yaitu menggunakan analisis gravitasi.

Hasil Analisis Model Gravitasi

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan daya tarik dan jangkauan terhadap daerah lain dengan menggunakan analisis gravitasi. Semakin besar angka yang dihasilkan maka daya tariknya juga semakin besar, dan begitupun juga sebaliknya. Semakin kecil angka yang dihasilkan maka daya tariknya pun juga semakin kecil. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa kecamatan dengan daya tarik terbesar berada di Kecamatan Kanigoro dengan nilai daya tarik sebesar 44.216.932,73 dan kecamatan dengan daya tarik terkecil berada di Kecamatan Bakung dengan daya tarik sebesar 1.576.391,17.

Tabel 3. Rata-rata Gravitasi Antar Kecamatan di Kabupaten Blitar

Kecamatan	Daya Tarik	Rank Daya Tarik
Kanigoro	44.216.932,73	1
Talun	34.707.067,47	2
Sutojayan	18.166.456,28	3
Garum	16.230.290,04	4
Ponggok	15.825.382,16	5
Gandusari	15.055.886,69	6
Srengat	12.853.827,37	7
Nglegok	12.463.167,13	8
Selopuro	11.546.357,07	9
Sanankulon	11.002.395,96	10
Wlingi	10.942.110,69	11
Kesamben	10.274.995,79	12
Udanawu	8.046.329,55	13
Wonodadi	6.621.484,94	14
Binangun	6.573.148,31	15
Kademangan	5.200.400,47	16
Selorejo	4.429.230,60	17
Wates	4.120.826,75	18
Doko	3.695.860,18	19
Panggungrejo	3.684.932,50	20
Wonotirto	3.436.584,98	21
Bakung	1.576.391,17	22

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil Analisis Pusat Pertumbuhan Primer, Pusat Pertumbuhan Sekunder, Pusat Pertumbuhan Tersier dan Daerah Hinterland

Berdasarkan kombinasi pada hasil analisis skalogram dan analisis model gravitasi, dengan memperhitungkan ketersediaan fasilitas, jarak, letak/lokasi dan kekuatan interaksi, kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan primer ada 4 yaitu antara lain Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun dan Kecamatan Sutojayan. Sedangkan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan sekunder ada 4 yaitu antara lain Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Kademangan. Serta kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan tersier (ketiga) ada 6 yaitu antara lain Kecamatan Wlingi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wates dan Kecamatan Panggungrejo. Kecamatan-Kecamatan yang tidak termasuk dalam pusat pertumbuhan tersebut merupakan daerah/wilayah hinterlandnya, yaitu antara lain Kecamatan Gandusari, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Binangun, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung.

Tabel 4. Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blitar

Kecamatan	Daya Tarik	Jumlah Fasilitas
Garum	16.230.290,04	28
Kanigoro	44.216.932,73	27
Talun	34.707.067,47	24
Sutojayan	18.166.456,28	25
Ponggok	15.825.382,16	25
Gandusari	15.055.886,69	21
Srengat	12.853.827,37	25
Nglegok	12.463.167,13	25
Selopuro	11.546.357,07	23
Sanankulon	11.002.395,96	26
Wlingi	10.942.110,69	27
Kesamben	10.274.995,79	27
Udanawu	8.046.329,55	21
Wonodadi	6.621.484,94	23
Binangun	6.573.148,31	22
Kademangan	5.200.400,47	24
Selorejo	4.429.230,60	24
Wates	4.120.826,75	22
Doko	3.695.860,18	24
Panggungrejo	3.684.932,50	21
Wonotirto	3.436.584,98	23
Bakung	1.576.391,17	20

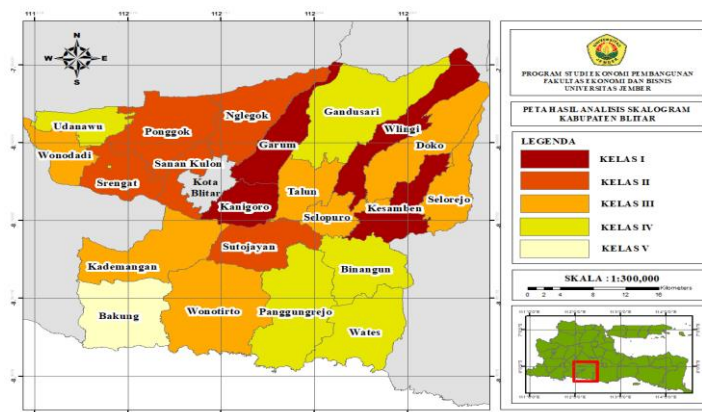
Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan

Kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas paling tinggi di Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil analisis skalogram, ditemukan bahwa kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Blitar dikelompokkan menjadi V kelas/orde. Kelompok kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas paling tinggi terdapat dalam kelas/orde I yaitu dengan jenis fasilitas sebanyak 27 – 28, yakni Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Wlingi. Sementara itu kecamatan dengan

ketersediaan fasilitas tinggi adalah kecamatan yang berada dalam kelas/orde II dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak 25 – 26 jenis. Kelompok kecamatan yang berada dalam kelas/orde II yakni Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Srengat. Kelas/Orde III merupakan kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas sedang yakni 23 – 24 jenis fasilitas. Kelompok kecamatan yang berada dalam kelas/orde III yaitu Kecamatan Kademangan, Kecamatan Talun, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Wonodadi. Sementara itu kecamatan dengan ketersediaan fasilitas rendah adalah kecamatan yang berada pada kelas/orde IV yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Udanawu. Kelompok kecamatan tersebut memiliki jenis fasilitas sebesar 21 – 22 jenis. Kelas/Orde V merupakan kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang paling rendah yakni 20 jenis fasilitas. Kelompok kecamatan yang berada pada kelas/orde V yakni kecamatan Bakung.



Gambar 2. Peta Hasil Analisis Skalogram di Kabupaten Blitar

Sumber: ArcGIS 10.8

Berdasarkan perhitungan analisis skalogram, Kecamatan Garum merupakan kecamatan yang memiliki jenis fasilitas paling tinggi yakni 28 jenis fasilitas. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Garum memiliki jenis fasilitas yang membedakan dengan kecamatan yang lain berupa jenis fasilitas pada kategori sarana pendidikan yang lengkap, mulai dari TK – Perguruan Tinggi termasuk Pesantren. Keberadaan jenis fasilitas pada kategori sarana pendidikan berupa Perguruan Tinggi hanya terletak pada Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro, sedangkan untuk jenis fasilitas pada kategori sarana kesehatan berupa Rumah Sakit hanya terletak di Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Ponggok. Selain itu untuk jenis fasilitas pada kategori layanan transportasi berupa Terminal hanya terletak di Kecamatan Kesamben dan layanan transportasi berupa Stasiun hanya terletak di Kecamatan Talun, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Garum.

Dalam penelitian ini, adapun letak/posisi Kecamatan Garum sangat berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar yang terletak di Kecamatan Kanigoro. Kondisi faktual juga mendukung temuan terkait akses

jalan di kecamatan ini, yang mana terdapat jaringan jalan yang menghubungkan secara langsung kepada wilayah Kota Blitar dan sekitarnya. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa, apabila dilihat dari jumlah penduduknya, terdapat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk kecil tetapi memiliki tingkat jenis fasilitas yang beragam seperti Kecamatan Selorejo dan Kecamatan Doko. Selain itu juga, terdapat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar tetapi memiliki tingkat jenis fasilitas yang rendah seperti Kecamatan Gandusari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Optari et al., (2021), yang menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh keberagaman jenis fasilitas, hal lain yang membedakan erat kaitannya dengan letak kecamatan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Apabila melihat dari hasil analisis skalogram pada Gambar 2, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi besar menjadi kecamatan pusat pertumbuhan di Kabupaten Blitar, yakni dikelompokkan pada kelas/orde I dan II. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2015) dimana kelompok kecamatan yang memiliki ketersediaan jenis fasilitas lengkap dibanding dengan kelompok kelas/orde kecamatan yang lainnya berpotensi untuk menjadi kecamatan pusat pertumbuhan. Salah satu perbedaan pada kelompok tersebut terletak pada keberadaan jenis fasilitas dalam kategori sarana pendidikan berupa Perguruan Tinggi, sarana kesehatan berupa Rumah Sakit, kategori layanan transportasi berupa Stasiun dan Terminal yang berada di kelas/orde I dan II (Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Ponggok). Sehingga kelompok wilayah tersebut memiliki fungsi pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

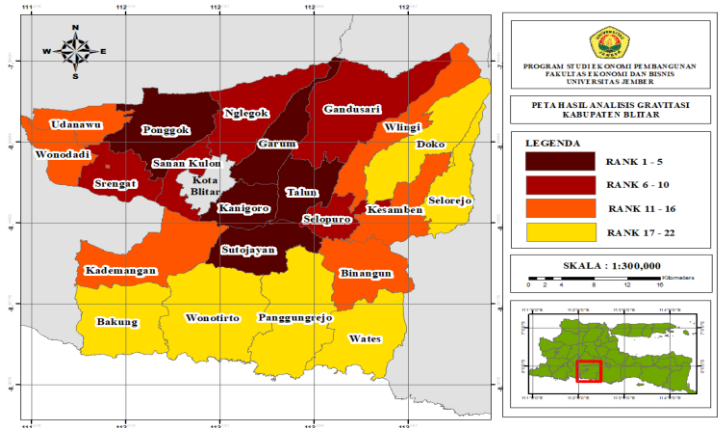
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori analisis skalogram milik Rondinelli (1985) bahwa untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah. Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa sebaran fasilitas cukup merata pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Blitar, mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan fasilitas ekonomi.

Kecamatan yang memiliki daya tarik terbesar di Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil analisis gravitasi, dari 22 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Blitar, daya tarik terbesar terletak di Kecamatan Kanigoro. Kecamatan Kanigoro memiliki rata-rata nilai daya tarik paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya seperti Kecamatan Talun, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Garum, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Kecamatan Gandusari, Kecamatan Srengat, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Doko, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan

Wonotirto dan Kecamatan Bakung. Hal tersebut disebabkan oleh letak/lokasi Kecamatan Kanigoro berada di tengah-tengah atau dikelilingi kecamatan lainnya. Selain itu, Kecamatan Kanigoro merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Blitar sendiri.

Berdasarkan hasil analisis gravitasi ditemukan bahwa, kecamatan yang memiliki jenis fasilitas paling tinggi belum tentu memiliki daya tarik yang kuat, begitupun juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, et al (2021) bahwa kecamatan yang memiliki ketersediaan jenis fasilitas yang paling tinggi belum tentu memiliki nilai interaksi yang kuat. Hal tersebut dapat disebabkan oleh jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan. Dalam penelitian ini, kecamatan di Kabupaten Blitar yang memiliki jenis fasilitas paling tinggi namun memiliki daya tarik yang lemah terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Wlingi. Sehingga apabila kecamatan tersebut dijadikan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan yang utama maka akan kurang efisien. Hal ini sesuai dengan teori gravitasi milik W.J Reilly (1929) yang menyatakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan kedua faktor penting yaitu jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.



Gambar 3. Peta Hasil Analisis Gravitasi di Kabupaten Blitar

Sumber: ArcGIS 10.8

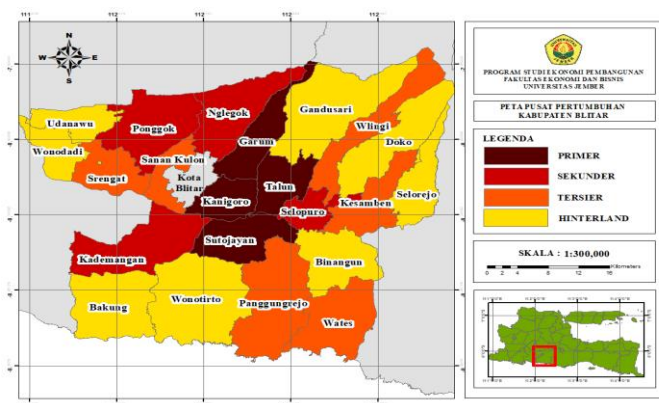
Kecamatan yang memiliki ketersediaan jenis fasilitas yang lengkap, perlu juga diperhatikan terkait dengan kualitas dari jenis fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan tersebut dan akses/keterjangkauan dari masyarakatnya. Contohnya pada jenis fasilitas berupa sarana pendidikan yang terletak di kecamatan yang memiliki daya tarik besar memiliki standart pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan dengan daya tarik rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sekolah favorit dengan kategori terbaik mulai dari SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang terletak di kecamatan-kecamatan memiliki daya tarik tinggi contohnya Kecamatan Garum, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Talun dan Kecamatan Kanigoro.

Adapun Kecamatan Kanigoro sebagai kecamatan dengan daya tarik terbesar juga dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas yang berada di pusat pemerintahan tersebut jauh lebih besar dan beragam, misalnya dalam fasilitas perekonomian (Pasar dan Industri Kecil dan Makro). Hal

tersebut sejalan dengan model gravitasi yang dikembangkan oleh Ravenstein (1885), dimana kekuatan interaksi dapat diukur salah satunya dari keberadaan kawasan industri dan perdagangan. Selain itu, Kabupaten Blitar diantara Kabupaten-Kabupaten yang saling berbatasan memiliki daya tarik berupa objek wisata sejarah maupun alam dan salah satu kabupaten penghasil coklat terbesar di Jawa Timur. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan model gravitasi (berfungsi ganda) sebagai teori lokasi dan alat dalam hal perencanaan (Tarigan, 2005), maka perlu diperhatikan pembangunan fasilitas-fasilitas pada kecamatan yang memiliki daya tarik tinggi agar hasilnya lebih maksimal. Sehingga perencanaan tersebut, harus sesuai apakah kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas terlengkap sudah tepat berada di lokasi yang benar/belum. Dan apabila pemerintah daerah akan membangun suatu fasilitas yang baru, dimanakah lokasi yang tepat agar pemanfaatan fasilitas menjadi lebih optimal.

Pusat pertumbuhan primer, pusat pertumbuhan sekunder, pusat pertumbuhan tersier dan daerah hinterland di Kabupaten Blitar

Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan primer merupakan pusat utama dari keseluruhan daerah yang dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang tingkatannya lebih rendah. Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan sekunder (kedua) merupakan sub daerah, yang diciptakan untuk mengembangkan sub daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan primer. Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan tersier (ketiga) berguna untuk memelihara kedinamisan terhadap daerah belakangnya. Berikut Gambar 4 merupakan peta pusat pertumbuhan Kabupaten Blitar.



Gambar 4. Peta Pusat Pertumbuhan (Pusat Pertumbuhan Primer, Pusat Pertumbuhan Sekunder, Pusat Pertumbuhan Tersier dan Daerah Hinterland) di Kabupaten Blitar
Sumber: ArcGIS 10.8

Sehingga kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dan daerah hinterland di Kabupaten Blitar dapat dikelompokkan sesuai dengan kekuatan interaksi dan jumlah fasilitas sebagai berikut:

Kelompok I, pusat pertumbuhan primer terletak di Kecamatan Garum, pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Nglegok, pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Wlingi beserta daerah hinterlandnya terletak di Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Doko.

Kelompok II, pusat pertumbuhan primer terletak di Kecamatan Kanigoro, pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Ponggok, pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Srengat dan Kecamatan Sanankulon beserta daerah hinterlandnya terletak di Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Udanawu.

Kelompok III, pusat pertumbuhan primer terletak di Kecamatan Talun, pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Selopuro, pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Kesamben beserta daerah hinterlandnya terletak di Kecamatan Binangun dan Kecamatan Selorejo.

Kelompok IV, pusat pertumbuhan primer terletak di Kecamatan Sutojayan, pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Kademangan, pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Wates dan Kecamatan Panggungrejo beserta daerah hinterlandnya terletak di Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung.

Pembagian kedalam 4 kelompok tersebut dikarenakan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan primer terletak pada 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar berdasarkan nilai daya tarik dan jumlah fasilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusliana dan Devi (2020) yang menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil analisis dengan kombinasi antara analisis skalogram dan model gravitasi dengan mempertimbangkan sebaran fasilitas dan kepadatan penduduk maupun jarak antar lokasi diketahui bahwa terdapat beberapa kecamatan yang masing-masing memiliki potensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Yakni dalam penelitian ini Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun dan Kecamatan Sutojayan merupakan kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan Primer yang mampu merangsang pertumbuhan wilayah disekitarnya. Posisi kecamatan-kecamatan tersebut ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana (fasilitas) dan nilai daya tarik tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Sedangkan kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan sekunder dan pusat pertumbuhan tersier memiliki nilai daya tarik dan ketersediaan jenis fasilitas yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan sekunder terjadi pergerakan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan tersier merupakan daerah potensial yang menjadi titik pengaruh diharapkan mampu menjaga kedinamisan wilayah sekitarnya.

Hasil penelitian ini mengacu pada teori milik Tarigan (2004), yang menyatakan bahwa pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memiliki kelengkapan fasilitas sehingga dapat menjadi pusat daya tarik. Sejalan dengan teori milik Friedman (1966) pusat-pinggiran, yang membagi pusat pertumbuhan menjadi tiga orde yang saling mempengaruhi, yang menjelaskan bahwa dalam skala regional terdapat hierarki pusat-pusat pertumbuhan seperti pusat pertumbuhan primer, pusat pertumbuhan sekunder, dan pusat pertumbuhan tersier. Dimana kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsinya.

Pembagian wilayah dalam kelompok tersebut sesuai dengan kekuatan daya tarik terhadap wilayah yang lain, sehingga akan lebih optimal apabila pusat pertumbuhan dan wilayah hinterlandnya memiliki daya tarik yang kuat.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi spasial di wilayah Kabupaten Blitar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan analisis skalogram, kecamatan yang memiliki ketersediaan jenis fasilitas tertinggi terletak di Kecamatan Garum. Kecamatan dengan ketersediaan fasilitas paling lengkap akan dapat berfungsi secara optimal dan dapat menjadi pusat pertumbuhan apabila daya tariknya terhadap kecamatan lain juga tinggi.
- Berdasarkan analisis gravitasi, kecamatan yang memiliki daya tarik terbesar terletak di Kecamatan Kanigoro. Dalam hal ini, kecamatan yang termasuk dalam daya tarik besar akan memiliki kualitas fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki daya tarik rendah.
- Berdasarkan analisis skalogram dan analisis gravitasi, pusat pertumbuhan primer di Kabupaten Blitar terletak di Kecamatan Garum, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun dan Kecamatan Sutojayan. Pusat pertumbuhan sekunder terletak di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Kademangan. Pusat pertumbuhan tersier terletak di Kecamatan Wlingi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Wates dan Kecamatan Panggungrejo. Dan daerah hinterland terletak di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Binangun, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wonotirto dan Kecamatan Bakung.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah Kab Blitar jika ingin menentukan daerah *Central Place* yang baru dan *hinterland*.

Referensi

- Agustina, S., D. Valeriani., dan A Yunita. 2021. The Development of Growth Centres and Hinterland Areas in Bangka Regency, Indonesia. *Journal of Social, Humanity, and Education*. 2(1). 1 – 17.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2020.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2021.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022.Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2023.Kabupaten Blitar.
- Darmawan, M. J., dan Tukiman. 2020. Analisis Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 10(1). 41 – 53.
- Friedmann, John. 1996. “Empowerment the Political of Alternative Development”. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, Three Cambridge Center.
- Gaffara, G. R., A. Fathu., dan Fatih. 2015. Kajian Skalogram Guttman Dan Indeks Sentralitas Marshall Untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- Gultom, R., & Hendarto, R. M. 2014. Analisa Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir. *Diponegoro Journal Of Economics*, 3(1), 86-99.
- Nainggolan, P. T. P. 2015. Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(12). 15 – 26.
- Optari, L. K., H. C. Diartho., dan D. Yunitasari. 2021. Analysis of the Economic Growth at the District Levelin Asahan Regency, North Sumatra. *Media Trend*. 17(2). 228 – 237.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahman, F., A. Astagini., dan A. D. F. Effendy. 2020. Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal: Refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. *Journal of Governance Inovation*. 2(1). 93 – 111.
- Ravenstein, E. G. 1885. The Laws of Migration. *Journal of the statistical society of London*. 48(2). 167 – 235.
- Reilly, W. J. (1929). *Methods for the study of retail relationships*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026. 2021. Blitar: Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

- Rondinelli, D. A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. Colorado: Westview Press.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim., dan D. R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Silviana, E., D. Yunitasari., dan R. N. Wilantari. 2021. *Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Rajawali Press: Jakarta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukirno, S. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan pembangunan wilayah*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tarigan, R. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*.
- Todaro dan Smith, 2006. *Pembangunan Ekonomi (terjemahan)*. Edisi Kesembilan. Erlangga: Jakarta.
- Yusliana, Y., & Devi, M. K. (2020). Interaksi wilayah pusat pertumbuhan melalui pendekatan skalogram dan gravitasi di wilayah pesisir daerah istimewa yogyakarta. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 4(2), 148-159.